PERANAN SUMBER DAYA BUDAYA BAGI PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU

Prof. Dr. J Lokolo¹

PENDAHULUAN

Batasan-batasan masalah yang disampaikan oleh panitia kepada kami adalah:

1. Membahasa pentingnya kajian ilmu budaya dalam pembangunan daerah Maluku
2. Sejauh mana peran, fungsi dan potensi sumber daya budaya dalam menentukan arah pembangunan daerah Maluku

Mengamati pembatasan tadi amka, ada 3 pokok yang perlu disoroti yakni:

- a. Pembangunan Daerah Maluku
- b. Kajian Ilmu Budaya
- c. Peran, fungsi dan potensi sumber daya budaya

I. PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU

Pada hakekatnya pembangunan merupakan perubahan yang disengajakan (intended change) atau perubahan yang direncanakan (planned change) secara sistematis keomprehensif (terpadu) dan menyatu (terintegrasi) untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam konteks ini, pembangunan berarti suatu proses rekayasa sosial maupun teknis (social and technical engineering) yang dimaksudkan sebagai tindakan interventif untuk mengatasi masalah dan atau memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai kehidupan.

Dinamika pembangunan mencerminkan upaya-upaya konstruktif dan produktif terutama dari sisi peran pemerintah untuk memanfaatkan seoptimal mungkin berbagai potensi sumber daya yang tersedia.

---

¹ Kepala Lembaga Kajian Budaya Daerah Maluku

Ini berarti pembangunan memerlukan suatu tata rencana yang tepat dan realistis untuk mengarahkan perubahan-perubahan di dalam masyarakat menuju pencapaian tujuan sebagaimana dicita-citakan.

Krisis multi dimensional yang diawali dari krisis moneter di Indonesia, telah mencerminkan betapa rapuh perekonomian negara, yang pada gilirannya berimplikasi terhadap bernilai ketidakpercayaan publik kepada pemerintah, sehingga memberi inspirasi bagi lahirnya gerakan reformasi yang berkeinginan melakukan koreksi kritis terhadap praktek penyelenggaraan negara yang dinilai menyimpang dari cita-cita proklamasi 1945. Berbagai potensi masalah yang terpendam selama kepemimpinan masa lalu yang sentralistik, dengan serta merta menemukan slaurannya dan diekspresikan oleh berbagai komponen masyarakat secara bebas. Tanpa disadari keadaan euforia ini telah melahirkan instabilitas politik dan keamanan yang sesungguhnya membahayakan keutuhan Indonesia sebagai Negara Kesatuan.

Sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maka apa yang terjadi secara nasional, juga dialami dan dirasakan oleh masyarakat di propinsi Maluku. Puncak permasalahan di daerah ini pada gilirannya mewujudkan dalam pertikaian sosial yang terjadi lebih dari 5 tahun, sehingga menimbulkan dampak negatif yang berimplikasi pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, antara lain dalam aspek sosial budaya.

Relasi-relasi yang sebelumnya terpelihara dan berlangsung akrab, diwarnai suasana kekeluargaan (harmonis) berdasarkan nilai-nilai kebangsaan dan budaya lokal dalam masyarakat mengalami distorsi yang sangat parah sehingga menyebabkan instabilitas sosial dan keamanan. Kekuatan kohesi sosial yang merupakan perekat keutuhan masyarakat sebagai suatu kesatuan warga bangsa dan anak daerah, berada pada tingkat yang cukup mengkhawatirkan. Demikian halnya dengan aspek pendidikan dan kesehatan yang menunjukkan penurunan tingkat kualitas. Hancurnya berbagai fasilitas dan hijrahnya sejumlah sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan ke daerah lain menyebabkan keterpurukan yang serius. Begitu pula gelombang pengungsian akibat kondisi pertikaian yang menyebabkan perubahan keseimbangan ekologis, sehingga menyimpan potensi konflik yang sewaktu-waktu dapat mengganggu stabilitas dan keamanan daerah.

Stagnasi aktifitas dan kemunduran perkembangan perekonomian daerah akibat pertikaian sosial yang berlangsung lebih dari 5 tahun telah melemahkan optimalisasi sumber-sumber ekonomi daerah Maluku dan menyebabkan meningkatnya angka penanganan dan kemiskinan di Maluku. Realitas ini menyebabkan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap dana pembangunan yang bersumber dari pemerintah pusat, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kemerosotan. Tentu disadari bahwa ketergantungan ini kontra produktif terhadap semangat otonomi daerah. Dan karena itu harus dapat ditanggulangi melalui berbagai upaya penguatan struktur dan sumber daya (semua aspek sumber daya yang ada di Maluku). Di samping kemunduran di bidang sosial budaya dan ekonomi, bidang-bidang yang lain seperti hukum, politik, dan pemerintahan daerah juga mengalami hal yang sama.

Sebagai wilayah pasca pertikaian, Propinsi Maluku memerlukan berbagai gagasan dan upaya konkret dan kreatif untuk mengakselerasi proses pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi dalam keseluruhan aspek kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip kebijakan ini melandasi pemerintah daerah dalam menyusun rencana strategis yang didasarkan pada beberapa prinsip.

- I. Kondisi di dalam masyarakat yang terindikasi masih menyimpan potensi konflik, khususnya terkait dengan pengalaman traumatis selama periode pertikaian antar kelompok berlangsung.
- II. Memperluas aksesibilitas semua lapisan masyarakat terhadap berbagai aset publik yang tersedia, sehingga dapat menimbulkan potensi konflik.
- III. Menciptakan kesempatan yang luas bagi kelompok masyarakat untuk saling berinteraksi, sehingga semakin memperpendek jarak sosial di dalam masyarakat.
- IV. Membangun kesadaran hidup bermasyarakat dan berbangsa dengan menjadikan keberagaman sebagai inspirasi untuk memperkaya pengalaman dan semangat untuk hidup.

KONDISI PASCA KONFLIK

Nilai-nilai budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Maluku, merupakan salah satu modal dasar bagi peningkatan

persatuan dan kesatuan termasuk menyemangati masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini. Hubungan-hubungan kekerabatan dan budaya harus terus didorong sehingga dapat menciptakan sinergitas yang andal bagi upaya bersama membangun Maluku Baru di masa mendatang. Perndukung budaya di Maluku terdiri ari ratusan sub-suku, yang dapat diindikasikan dari pengguna bahasa lokal yang diketahui masih aktif dipergunakan sebanyak 117 dari jumlah bahasa lokal yang pernah ada kurang lebih 130-an. Meskipun masyarakat di daerah ini emncerminkan karakteristik masyarakat yang multi kultur, tetapi pada dasarnya mempunyai kesamaan-kesamaan nilai budaya sebagai representasi kolektif. Salah stau diantaranya adalah falsafah siwa lima yang selama ini telah melembaga sebagai world view atau cara pandang masyarakat tentang kehidupan bersama dalam kepelbagaian. Di dalam falsafah ini terkandung berbagai pranata yang memiliki common values dan dapat ditemukan di seluruh wilayah Maluku. Sebeutlah pranata budaya seperti Masohi, maren, sweri, sasi, hawear, pela gandong dan lain sebagainya. Adapun falsafah siwalima dimaksud telah menjadi simbol identitas daerah.

Dalam konteks pembangunan daerah, nilai-niali budaya lokal yang masih ada dan hidup di kalangan masyarakat, dapat dipandang sebagai modal sosial yang perlu dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan daerah. Olehnya itu pemerintah melakukan upaya-upaya untuk merevitalisasi nilai-nilai budaya daerah sebagai modal sosial (social capital) yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan daerah yang berbasis potensi lokal:

- a. Memanfaatkan, meningkatkan, dan terus membina nilai-nilai budaya lokal dalam rangka mempererat solidaritas kebangsaan.
- b. Memfasilitasi konsolidasi kekuatan masyrakat melalui upaya merevitalisasi institusi-institusi budaya lokal secara bertahap dan berkesinambungan.
- c. Terus mendorong dan membuka ruang bagi aprtisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat, termasuk melalui institusi-institusi adat dan keagamaan.
- d. Memfasilitasi kajian-kajian sosio-antropologis tentang masyarakat dan budaya orang Maluku sebagai masyarakat kepulauan.

Sehingga dengan demikian 'misi' Rencana Strategis Pemerintah Propinsi Maluku Tahun 2003-2008 untuk bidang sosial-budaya adalah:

1. Memulihkan kondisi daerah pasca konflik yang meliputi berbagai aspek kehidupan, prasarana, dan ketertiban masyarakat.
2. Melakukan upaya-upaya untuk merevitalisasi nilai-nilai budaya daerah sebagai modal sosial (social capital) ayng dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan daerah yang berbasis potensi lokal.

II. KAJIAN ILMU BUDAYA

Berbicara tentang ilmu budaya pada dasarnya adalah berbicara tentang suatu dimensi yang amt luas dan multi kompleks. Karena sesungguhnya buday itu adalah segala sesuatu yang telah dibuat oleh manusia dari zaman dahulu sampai sekarang, trmasuk juga hubungan antara manusia dengan lingkungan alam bahkan manusia dengan tata surya. Ilmu-ilmu mayor yang berbicara tentang budaya adalah antropologi dan sejarah, termasuk semua percabangannya.

Sehubungan dengan kajian ilmu budaya dalam menunjang pembangunan daerah Maluku seyogyanya turut emnunjang program pembangunan yang telah digariskan oleh Pemerintah Daerah Maluku melalui Visi, Misi, dan Renstra. Dengan demikian dpat kita asumsikan bahwa kajian-kajian yang dilakukan oleh institusi yang relevan hendaknya dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi pembangunan daerah Maluku. Penyusunan program kajian yang sinergis anatra berbagai elmbaga pemeritnah daerah (maupun pusat) seperti Balai Arkeologi, Balai Kajian Sejarah dn Nilai Tradisional, Museum Negeri Siwa Lima, Taman Budaya, subdin Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan, Subdin Kesenian, lembaga Kebudayaan Daerah Maluku, dengan mendapat dukungan dana yang memadai. Selain itu ada juga kajian-kajian di bidang budaya yang dilakukan oleh pihak LSM dan Perguruan Tinggi.

Menurut pengamatan kami apabila semua hasil kajian ini tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi dipadukan (sinergis) untuk benar-benar mencapai tujuan dan arah strategis pembagunan yang telah digariskan oleh Pemerintah Daerah, maka ada keyakinan bahwa hasilnya akan sangat optimal dan berdampak positif bagi masyarakat. Sebab kalau kajian-kajian itu berjalan tidak seiring (alias sendiri-sendiri), maka hasilnya pun berskala kecil dan dampaknya juga kecil atau tidak ada dampak sama sekali.

III. PERAN, FUNGSI, DAN POTENSI SUMBER DAYA BUDAYA DALAM MENENTUKAN ARAH PEMBANGUNAN DI MALUKU

Peran atau fungsi sumber daya budaya (cultural resources) dalam menentukan arah pembangunan di Maluku sangat penting. Sebagaimana yang telah dikatakan sumber daya budaya dapat dipandang sebagai modal sosial untuk membangun masyarakat Maluku. Salah satu sumber daya budaya di Maluku adalah kearifan sosial (local wisdom). Meningkatnya laju pembangunan daerah dapat mempengaruhi eksistensi adat istiadat yang berisikan local wisdom masyarakat kepulauan Maluku. Padahal eksistensinya memang luas dan meliputi bidang ekonomi, pertanian, peternakan, kesejahteraan, pendidikan, agama dan kepercayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum serta politik dan aparatur negara. Inventarisasi local wisdom masyarakat kepulauan Maluku perlu dilakukan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan mengkodifikasikan agar pewarisan secara tertulis dapat dilakukan secara pasti kepada generasi yang akan datang. Bila tidak maka ada kemungkinan suatu waktu nanti 'local wisdom' akan hilang. Beberapa contoh local wisdom adalah pengetahuan akan iklim dan cuaca, teknik bercocok tanam, perikanan, pengetahuan tentang perbintangan, teknik membuat perahu, pemahaman arus laut, dan sebagainya.

Globalisasi yang semakin menggejala telah mengakibatkan batas-batas politik, ekonomi dan sosial budaya antar bangsa menjadi begitu transparan. Masa depan selalu ditandai dengan perubahan yang sering tidak dapat diprediksi sebelumnya, maka kita tidak hanya dituntut untuk memikirkan apa yang telah dan sedang terjadi, tetapi dituntut untuk berpikir jauh ke depan. Berbagai kecenderungan perubahan yang mungkin terjadi sangat terkait dengan dinamika proses pemabangunan dan modernisasi bangsa yang sarat dengan tantangan dan tuntutan sebagai perwujudan dari aspirasi masyarakat yang terus berubah dan berkembang. Akibat proses pembangunan dan modernisasi menjadi semakin kompleks dan multidimensional serta mempengaruhi setiap aspek kehidupan setiap manusia dan masyarakat karena proses pembangunan dan modernisasi tidak lain adalah proses 'mengubah untuk berubah'. Dalam proses 'mengubah untuk berubah' kita harus mampu ikut serta dalam memimpin dan memelopori perubahan tersebut dan tidak sekedar menjadi pengikut atau bahkan menjadi korban.